

**PENDIDIKAN POLITIK PADA ANAK USIA DINI (Studi Kasus di
TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)**

Oleh : Huliqa Sakinah

Email : Sakinahhuliqa@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

One of the agendas of President Joko Widodo's Nawa Cita is to strengthen the nation's character. The Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 58 of 2009 concerning Standards for Early Childhood Education covers the developmental environment: "Receiving language, expressing language and literacy. One level of development is: recognizing letter symbols. Connect pictures with words, show objects with words, read pictures that have words.

The objectives of writing this thesis are: First, to find out political education in early childhood (Case Study at Pertiwi Teluk Kuantan Kindergarten, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2020). Second, to find out the obstacles in political education in early childhood (Case Study in TK Pertiwi Teluk Kuantan, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2020). This research is a qualitative research. This research was conducted at Pertiwi Teluk Kuantan Kindergarten, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The techniques used to collect data in this research are (1) Interview, (2) Observation, and (3) Document tracing.

The conclusion of this study shows that Political Education in Early Childhood at Pertiwi Teluk Kuantan Kindergarten, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency involves teachers as the main actors and the Kuantan Singingi Regency Education Office has duties, among others, overseeing the implementation of education, and setting educational service standards, providing writers with suggestions. so that the active role of the government represented by the Education Office and related parties in providing political education to early childhood becomes the initiator who gives deeper attention to existing educators and to parents is expected to protect the rights of children in the world of education.

Keywords: Actors, Materials, Time, Political Education, Political Education Facilities and Infrastructure.

A. PENDAHULUAN

Era Orde Baru menyisakan permasalahan yang begitu mendalam bagi Bangsa Indonesia yaitu kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, akibat proses depolitisasi yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Orde Baru.¹ Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang demokrasi, pembentukan sikap demokratis, kritis, berani melakukan kontrol dan menegakkan kebenaran dan keadilan, terasa kurang diperhatikan.² Proses depolitisasi ini menyebabkan masyarakat cenderung bersifat pasif dan mudah untuk dimobilisasi oleh penguasa. Karakter warga negara yang pasif, tidak memiliki kemandirian, dan mudah dimobilisasi merupakan penghambat bagi terciptanya demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Urusan pemerintahan *konkruen* merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi

dan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Saat ini, pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat umum cenderung kurang efektif, bahkan dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena sedikitnya peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendidikan politik. Ada satu undang-undang saja yang mengatur tentang pendidikan politik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik, dan negara dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan diri untuk melakukan pendidikan politik. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menjelaskan bahwa negara hanya memfasilitasi program-program pendidikan politik yang dilakukan oleh para agen politik.

Agen politik antara lain: Pemerintah, Sekolah Media Massa,

¹Rini Rohmawati. 2012. Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis Di Sma

Negeri Kabupaten Bantul. *Skripsi FISIP*. Universitas Negeri Yogyakarta.

²Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: FIS UNY. Hlm. 55

Partai Politik, Teman dan keluarga.³ Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang tak terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat siswa suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat siswa negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik siswa suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan siswa negara tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, ini merupakan salah satu dasar dan tujuan dari pendidikan nasional yang seharusnya menjadi acuan bangsa Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik pada Pasal 3 tercantum tentang Sasaran

dari fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

1. Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
3. Berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Dan Pasal 4 yang berbunyi “Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif. Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja, sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan.

Pendidikan karakter merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan politik. Hal ini perlu dilakukan baik siswa lingkungan pendidikan formal, informal, maupun masyarakat secara umum. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun setiap warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik tidak identik dengan urusan politik praktis, tetapi bagaimana setiap warga negara dibangun mentalnya untuk memiliki atribut kebangsaan yang positif seperti cinta tanah air, rela berkorban, demokratis, dan gotong royong, serta

³<https://www.dictio.id/t/siapa-saja-agen-agen-sosialisasi-politik/11250> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

mampu berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Pendidikan taman kanak-kanak yang berumur sekitar 4-6 tahun sering disebut TK merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan keperibadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Menurut Permendiknas Republik Indonesia No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini meliputi lingkungan perkembangan: ”menerima bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Setiap lingkup perkembangan mempunyai tingkat pencapaian perkembangan yang berbeda. Salah satu dari tingkat pencapaian perkembangan adalah: mengenal simbol-simbol huruf. Indikator tingkat pencapaian perkembangan mengenal simbol-simbol huruf adalah Menghubungkan gambar dengan kata, Menunjukkan benda dengan kata, Membaca gambar yang memiliki kata.

Dinas Pendidikan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Pada tahun 2020 mengadakan peninjauan terkait dengan pendidikan TK di Kabupaten Kuantan Singingi, Adapun dari hasil peninjauan tersebut terkait dengan Kurikulum Penilaian menggunakan K-13 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Pihak dinas juga memberikan arahan dan masukan terkait dengan memperbanyak memberikan materi Pendidikan Politik kepada anak TK landasan tersebut diperkuat dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam Kurikulum 2013 TK, penilaian yang dilakukan oleh pendidikan yaitu dengan pendekatan autentik (*Authentic Assessment*).

Menurut Morrison (2015), ciri-ciri penilaian autentik adalah:

- a. Berdasarkan kurikulum; anak dinilai berdasarkan apa yang mereka pelajari dan kerjakan.
- b. Merupakan proses kerja sama dalam melibatkan anak, guru dan orang tua yakni dalam proses penilaian yang kooperatif dan kolaboratif; tujuannya adalah membuat penilaian yang berpusat pada anak.
- c. Merupakan bagian dari proses belajar.
- d. Menilai anak secara menyeluruh, bukan hanya dari penguasaan keterampilan.
- e. Penilaian yang berkelanjutan sepanjang tahun ajaran
- f. Menilai anak dan karya mereka yang sebenarnya dengan menggunakan contoh karya, portofolio, performa, jurnal, proyek, dan observasi guru.
- g. Mempertimbangkan kebutuhan khusus menyangkut bahasa, budaya dan kebutuhan khusus lainnya.
- h. Menggunakan sejumlah cara yang berbeda untuk menentukan prestasi anak dan apa yang mereka ketahui dan mampu lakukan.

Kualitas dan kuantitas suatu tempat pendidikan sangat penting diperhatikan guna meningkatkan kepuasan orang tua anak. Oleh karena itu kinerja suatu pendidikan dikatakan baik apabila kualitas dan kuantitas yang diberikannya pun baik. Salah satu yang saya dapatkan dilapangan adalah ketika saya bertanya warna bendera Indonesia berwarna apa, dan siapa nama Presiden kita saat sekarang ini, dari total anak TK yang berjumlah 51 orang hanya 10 orang yang mengetahui dan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sekarang apakah TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memberikan pendidikan karakter terkait dengan pendidikan politik anak.

Selain fenomena diatas juga terdapat kurangnya kualitas belajar anak sebagaimana dari hasil yang saya dapatkan melalui wawancara orang tua antara lain: Dalam hal menilai dan memahami suatu gambar dikenal atau diajarkan di bangku TK begitupun di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua anak adalah sebagai berikut: "Ia memang diajar, yang diajar itu kalau saya Tanya keanak jawabannya diajarkan cara menghitung mengenal gambar, menyusun gambar/ menyesuaikan gambar, dan dibidang keagamaan itu di kenalkan huruf-huruf Al-quran ada kemudian diajarkan cara berdoa seperti doa makan, minum, tidur. Dan untuk pendidikan politik belum ada saya dengar, ia kalau dipikir memang penting untuk diajarkan kepada anak diusia TK, namun di TK yang saya pilih ini belum pernah terdengar baik itu sosialisasi dari pihak atasan seperti dinas pendidikan maupun guru setempat".

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yang relevan dengan masalah penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran masalah sebagaimana di uraikan diatas, maka berikut dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pendidikan politik pada anak usia dini (Studi Kasus

di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)?.

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pendidikan politik pada anak usia dini (Studi Kasus di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)?.

C. Kerangka Teori

1. Pemerintahan

Menurut Ndraha pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.⁴

Menurut Suryaningrat Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.⁵ Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan.⁶

2. Kebijakan

⁴Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 36

⁵Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rieneka Cipta. Hlm. 2

⁶Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. Hlm. 6

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.⁷

Istilah “kebijakan” (*Policy*) sering diartikan sebagai sebuah keputusan yang menyatakan kehendak, tujuan, prinsip atau maksud sebagai pedoman dalam mencapai sasaran dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terkait. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Kebijakan sebagai suatu program yang berorientasi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah berasal dari suatu lembaga pemerintahan atau organisasi.⁸

3. Sosialisasi Politik

Fred. Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam artisempit dan luas, yaitu:

1. Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab
2. Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk

didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.⁹

4. Pendidikan Politik

Selanjutnya Alfian menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun.

Menurut Kartini Kartono pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.¹⁰ Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda. Prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.

5. Teori Tata Kelola Pemerintah (*good governance*)

⁷Alwi, Syafaruddin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 75

⁸Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 185

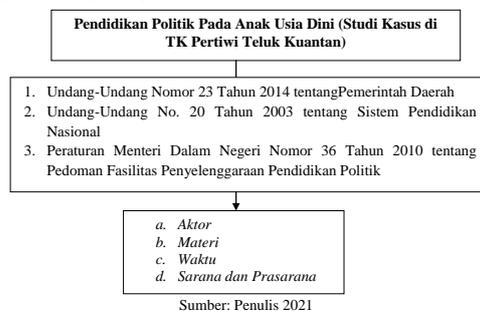
⁹Althoff, Michael Rush. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Rajawali. Hlm. 35-36

¹⁰Kartini Kartono. 1996. *Pempimpin dan Kepimpinan*. Bandung: CV. Rajawali. Hlm. 64

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.¹¹ Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

D. Kerangka Berfikir

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir:



E. Definisi Konseptual

1. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.
3. Aktor Pendidikan Politik adalah pelaku pendidikan politik. Aktor pendidikan politik antara lain,

keluarga, guru, masyarakat, sekolah, teman bermain, dan kelompok kepentingan.

4. Waktu Pendidikan Politik adalah waktu pelaksanaan pendidikan politik berlangsung. Sekolah menjadi tempat proses pendidikan terjadi, dimana anak didik diajarkan untuk mengenal simbol-simbol negara berupa gambar, bentuk, gerakan atau benda, dan juga menanamkan sikap rasa cinta tanah air kepada anak sejak dini.
5. Sarana dan prasarana pendidikan politik adalah alat dan tempat penunjang utama berlangsungnya pendidikan politik. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan politik dan juga terdapat penunjang lainnya seperti materi dan bahan ajar berupa simbol dan gambar yang mengandung unsur rasa cinta tanah air.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya.¹² Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif

¹¹Kurlinawati, Fransiska.2012. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Universitas Sumatra Utara Medan.

¹²Muslimin.2002.*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM. Hlm. 12

adalah karna Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Implementasi dari suatu tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan hal yang wajib atau dituntut oleh zaman guna menjadi paradigma dari setiap pengelolaan pemerintahan. Tidak terkecuali pemerintahan daerah. Beberapa faktor yang kemudian menjadi indikator awal dari kemunculan paradigma ini sendiri telah banyak di uraikan lewat penelitian-penelitian sebelumnya.

Banyak dari para cendekiawan merumuskan apa-apa yang kemudian menjadi tujuan (*goals*) dari paradigma ini. Hal ini merupakan hal fundamental dalam pembahasan tata kelola pemerintahan, baik secara akademis maupun praktis. Jauh, telah diwacanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini kerap kali mendapat batu sandungan. Merupakan suatu tugas intelektual tersendiri untuk setiap cendekiawan untuk menganalisis kerja, implementasi serta mengevaluasi setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan

pemerintah. Tak luput pula kita mengamati bagaimana partisipasi serta tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kerja dan kinerja dari pemerintahan. Perlulah kita mengamati dengan baik apa yang dimaksudkan dengan *good governance* sendiri.

Anak cerdas berhati mulia adalah pemimpin masa depan, peran keluarga, guru dan masyarakat sangat penting terhadap tumbuh kembang anak. Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa tampaknya tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Pembelajaran politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui media dapat dikatakan jauh dari pendidikan politik yang ideal. Penanaman konsep politik pada Usia Dini sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep yang salah dan keliru tentang politik.

Pentingnya pendidikan politik pada masa anak-anak sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang kedepannya. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran tentang politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk mau berpartisipasi langsung dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Berikut Indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini tentang Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini dalam hal ini di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya sebagai berikut :

a. Aktor Pendidikan Politik

Pendidikan menjadi faktor penting dari kemajuan suatu bangsa, yang mana masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Berbicara soal pendidikan kita tidak bisa terlepas dari figur seorang guru. Guru menjadi aktor terdepan dalam mengaktualisasikan pendidikan, sehingga disini guru membutuhkan kompetensi pengajaran yang baik untuk menumbuhkan kualitas pendidikan yang baik pula. Faktor guru juga sangat berpengaruh pada minat belajar siswa kedepannya.

Terkait dengan pendidikan politik anak Usia Dini di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa actor yang dapat kita lihat antara lain ada guru, orang tua beserta murid tidak lepas dari pengawasan Dinas pendidikan tentunya.

Bahwa guru merupakan Aktor yang penting didalam dunia pendidikan. Maka dari itu keahlian guru untuk memberikan pendidikan kepada murid sangat perlu dikuasai, guru harus mempunyai keahlian dibidangnya sehingga anak atau murid mudah mencerna apa yang diajarkan oleh guru.

Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat

dilakukan tindakan perbaikannya.

Wawancara peneliti kepada Informan diatas menunjukan bahwa setiap Instansi diberikan pengawasan secara menyeluruh. Walaupun pengawasan yang diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi masih jarang ditemui dilapangan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya,

¹³Sujanto.1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 63

selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan yaitu pihak Dinas Pendidikan dalam memberikan pengawasan pada TK Pertiwi dalam satu tahun hanya 1x kunjungan. Hal ini membuat Dinas tidak ikut dalam perkembangan pembangunan baik itu berupa pengelola sarana dan prasarana, dan Dinas Pendidikan hanya mendapatkan buku laporan atas kinerja yang dilakukan.

b. Materi atau Bahan Ajar

Materi yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapat diatas, dapat dipahami bahwa keterlibatan Dinas pendidikan diantaranya memberikan pendidikan politik kepada anak TK adalah dengan kurikulum ajaran. Oleh karena itu, selain dengan tujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dari segi pendidikan yang diberikan juga berperan dalam meningkatkan minat belajar anak dan itu merupakan wahana partisipasi dalam dunia pendidikan yang memadukan

pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. membantu dunia pendidikan dalam merencanakan dan pelaksanaan.

c. Waktu Pelaksanaan

Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

Temuan peneliti di atas dapat dipahami bahwa guru atau pendidikan tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan, memandang anak duduk dibangku TK diharapkan untuk tidak berlebihan dalam mengatur waktu pada TK Pertiwi Teluk Kuantan. Dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan perlu diketahui lamanya pekerjaan tersebut diselesaikan, atau bisa disebut juga jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di TK Pertiwi Teluk Kuantan dan perabot sekolah, pengadaan sarana dan prasarana alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium dan Pengadaan sarana dan prasarana media pendidikan yang dikelompokkan

menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengadaan bangunan di TK Pertiwi Teluk Kuantan dilakukan dengan cara membangun bangunan baru. Dalam mengadakan bangunan baru melewati beberapa tahapan yang pertama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lapangan. Sebelum perencanaan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu harus diadakan persiapan yaitu pengumpulan data, pembuatan program kebutuhan bangunan/ruangan, pengarahannya penugasan dan pengadaan tanah. Dan dalam pengadaan gedung TK Pertiwi Teluk Kuantan telah memiliki jasa konsultan agar tanah aman tanpa ada yang mengganggu, sehingga dengan izin yang dilakukan TK Pertiwi Teluk Kuantan dapat dibangun dengan berbagai tata cara pengizinan.

Berdasarkan pemaparan guru TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di atas menjelaskan bahwa sebelum final dibangun TK Pertiwi Teluk Kuantan terlebih dahulu sudah mengurus segala keperluan pembangunan yang dianggap penting seperti kejelasan tanah yang dibangun dan izin

pembangunan lainnya yang dianggap perlu.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pelajaran

Pengadaan sarana dan prasarana alat pelajaran di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya program pendidikan. Pengadaan alat pelajaran atau barang di TK Pertiwi Teluk Kuantan memiliki kerja sama dengan beberapa supplier, toko-toko besar, dll. Pengadaan sarana dan prasarana program dilakukan menggunakan proposal pengadaan yang ditujukan kepada kepala TK Pertiwi dengan daftar kebutuhan dan rincian harga. Proses pengadaan sarana dan prasarana dengan pengajuan proposal ke kepala TK Pertiwi, apabila proposal sarana dan prasarana disetujui kepala TK Pertiwi maka akan menerima barang sesuai daftar kebutuhan.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana program di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan proposal. Proposal diajukan ke TK Pertiwi dengan daftar kebutuhan dan rincian harga.

Terkait dengan Sarana dan Prasarana penunjang dalam memberikan pendidikan. Berikut yang dapat peneliti tampilkan terkait dengan sarana dan prasarana inti yang ada di TK Pertiwi :

Tabel III.3

**Data Alat Kelengkapan TK Pertiwi
Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2020**

N o	Alat Kelengkapan	Jumla h	Keteranga n
1	Komputer	1	Bagus
2	Tempat duduk untuk orang tua yang menunggu anak	3	2 Rusak
3	AC	1	Rusak
4	Kipas	2	Bagus
5	Printer	2	1 tidak bisa digunakan

Sumber: TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dapat di lihat di dalam tabel diatas terdapat beberapa di bagian sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan pendidikan mengalami kerusakan pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya pihak TK dalam memelihara dan menjaga alat kelengkapan TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

2. Hambatan dalam Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Dalam setiap Pendidikan Politik, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini dalam hal ini

Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang, terkait dengan kendala adalah sebagai berikut:

Adapun menurut seksi Pembinaan Paud di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik pada anak Usia Dini sebagaimana mestinya antara lain adalah :

a. Sarana dan prasarana yang tidak terjaga

Sarana dan perasana merupakan penunjang untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian anak di TK Pertiwi. Maka dalam pemeliharaan harus dijaga dengan baik. Akan tetapi, TK Pertiwi tidak menjaga sarana dan prasarana yang ada. Misalnya, sarana tempat duduk untuk menunggu anak-anak dan printer yang tidak berfungsi dan tidak di perbaiki.

b. Orang Tua anak dari TK yang kurang memahami pendidikan anak yang harus dilakukan pada Usia Dini

Adanya pemahaman yang negatif dari orang tua anak, sehingga perlu membagikan mana yang perlu dan benar-benar harus diajarkan dan mana yang hanya biasa saja dan tidak perlu diulangi. Disini guru harus berperan dalam

memberikan motivasi kepada orang tua anak.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini di TK Pertiwi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan Guru sebagai Aktor utama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas antara lain adalah mengawasi penyelenggaraan pendidikan, dan menetapkan standar pelayanan pendidikan. Dalam penerapan pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu Dinas Pendidikan belum maksimal. Hal ini terkait dengan Materi Pelajaran atau Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) TK Pertiwi Teluk Kuantan yang melibatkan pendidikan politik belum optimal diterapkan serta terdapat permasalahan pada pengawas pendidikan yang jarang untuk sidak ke lapangan. Selain itu masih ada beberapa yang kurang seperti penunjang dibagian sarana dan prasarana pendidikan di TK Pertiwi.
- 2) Hambatan dalam Pendidikan Politik Pada Anak Usia Dini yaitu Dinas Pendidikan, hal ini dikarenakan kemampuan untuk menyediakan informasi yang belum sepenuhnya memadai, serta Kurangnya kesadaran para pihak yang terlibat dalam mengelola pendidikan TK Pertiwi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan pendidikan politik pada anak Usia Dini untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam kepada Pendidik yang ada dan kepada orang tua anak serta diharapkan dapat melindungi hak-hak anak di dunia Pendidikan.
2. Sebaiknya untuk Guru di TK Pertiwi diharapkan segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan lebih memperhatikan kurikulum yang sesuai dengan pendidikan anak di Usia Dini.
3. Untuk orang tua anak diharapkan menyesuaikan kehidupan anak di bidang pendidikan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Syafaruddin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi. Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPFE.
- Althoff, Michael Rush. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Rajawali
- Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: FIS UNY.
- Kartini Kartono. 1996. *Pempimpin dan Kepimpinan*. Bandung: CV. Rajawali

Muslimin.2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rieneka Cipta

Sujanto.1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Jurnal dan Skripsi

Kurlinawati, Fransiska.2012. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Universitas Sumatra Utara Medan

Rini Rohmawati. 2012. Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis Di Sma Negeri Kabupaten Bantul. *Skripsi FISIP*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

<https://www.dictio.id/t/siapa-saja-agen-agen-sosialisasi-politik/11250> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020